



IJ-REDD+ Policy Brief

Series #2

Monitoring Forest CO₂ Emissions and Addressing Causes in West Kalimantan

REDD+ di Kalimantan Barat

Pada Bulan Januari 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Kelompok Kerja REDD+ untuk memungkinkan dan mengamankan akses terhadap mekanisme pendanaan REDD+, terutama untuk pembayaran berbasis hasil, oleh pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan terkait di Provinsi Kalimantan Barat. Sejak awal, Proyek IJ-REDD+ telah memfasilitasi proses pengembangan kapasitas kelompok kerja untuk mewujudkan target tersebut.

Setelah Pemerintah Indonesia menyerahkan Tingkat Emisi Rujukan Hutan Nasional (FREL) ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Bulan November 2015, Kelompok Kerja REDD+ mulai merumuskan FREL provinsi dengan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MoEF) dan menyelesaikan pekerjaan pada Bulan Agustus 2016. Berdasarkan FREL provinsi dan juga kerangka pengelolaan hutan yang ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini Kelompok Kerja merevisi dan menguraikan strategi REDD+ provinsi yang awalnya disusun pada Bulan November 2013.

Pemantauan Emisi serta Analisis Penyebabnya

Strategi REDD+ provinsi hasil revisi menggambarkan target pengurangan emisi untuk Tahun 2020-2030, yang merupakan pengurangan 60% terhadap FREL, dan akan menjadi pedoman utama kegiatan berbasis lahan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di provinsi Kalimantan Barat dalam dekade berikutnya. Diperkirakan bahwa rencana pembangunan jangka menengah provinsi berikutnya untuk Tahun 2018-2023 serta rencana kerja tahunan tiap instansi di provinsi akan mencerminkan esensi strategi REDD+ berupa pengurangan emisi CO₂ melalui mitigasi deforestasi dan degradasi hutan.

Diantaranya, salah satu tantangan utama yang ditunjukkan dalam strategi hasil revisi adalah pengembangan mekanisme pemantauan dan pelaporan emisi CO₂ secara reguler dari hutan dan analisis penyebab emisi. Pekerjaan pemantauan, pelaporan dan analisis semacam itu harus dilakukan secara reguler. Misalnya, strategi REDD+ provinsi hasil revisi melaporkan situasi deforestasi dan degradasi hutan pada Tahun 2012-15 dan menganalisis penyebabnya dengan mengacu pada data tentang izin perkebunan dan kelapa sawit, dan pekerjaan ini perlu dilanjutkan pada Tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, Kelompok Kerja akan membentuk mekanisme operasional pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan analisis kerja.

REDD+ in West Kalimantan

In January 2012, the provincial government of West Kalimantan established a REDD+ Working Group to enable access to REDD+ financing mechanisms, in particular to result-based payments provided to the provincial government and concerned stakeholders in the province. Since its inception, the IJ-REDD+ Project has assisted the Working Group in realizing the access to the REDD+ financing.

Soon after the Government of Indonesia submitted the National Forest Reference Emission Levels (FREL) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in November 2015, the REDD+ Working Group commenced the formulation of the provincial FREL with support from the Ministry of Environment and Forestry (MoEF). The provincial FREL work was completed in August 2016. On the basis of the provincial FREL and the forest management framework (stipulated by Law No.23-2014 by the regional government), the Working Group is now revising and elaborating the provincial REDD+ strategy that was originally compiled in November 2013.

Emissions Monitoring and Analysis of Causes

The revised provincial REDD+ strategy describes the emission reduction target for the years 2020–2030, which involves a 60% reduction of FREL and is poised to serve as the principal guideline for land-based activities conducted by stakeholders in the province over the next decade. It is envisioned that the forthcoming provincial mid-term development plan for 2018–2023 and the annual work plans of the respective provincial departments will reflect the essence of the REDD+ strategy for CO₂ emission reductions through the mitigation of deforestation and forest degradation.

One of the key challenges that have been referred to in the revised strategy is developing a regular monitoring and reporting mechanism for CO₂ forest emissions and conducting an analysis of the causes of such emissions, as monitoring, reporting, and analytical work needs to be conducted regularly. In addition, the revised provincial REDD+ strategy reported on deforestation and forest degradation in 2012–15 and analyzed the causes by referring to plantation data and palm oil concession licenses, and this work needs to continue post-2016. In this respect, the Working Group will establish an operational mechanism for implementing the associated monitoring, reporting, and analytical work.

Dalam mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah provinsi serta rencana kerja tahunan, instansi terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana tersebut diharapkan dapat merefleksikan pekerjaan tersebut di atas mengenai emisi CO₂ dan perspektif berikut yang disarankan untuk dimasukkan:

1. Analisis penyebab deforestasi dan degradasi hutan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
2. Merefensi data yang valid dan akurat dari masing-masing sektor termasuk kehutanan, pertanian, pertambangan dan lain-lain;
3. Melakukan pengecekan di lapangan untuk peningkatan akurasi data; dan
4. Mengklarifikasi peran pemangku kepentingan terkait dan pengaturan kelembagaan mereka.

Sebenarnya, pekerjaan pemantauan deforestasi dan degradasi hutan pada Tahun 2012-2015 mencakup analisis tingkat kabupaten, dan temuannya menunjukkan bahwa: (i) pengembangan perkebunan kayu cepat tumbuh di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara merupakan salah satu faktor penyebab utama deforestasi, dan (ii) deforestasi lebih menonjol di Zona Non Hutan dibandingkan dengan Zona Hutan.

Kesimpulan

Di Indonesia, baik Provinsi Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur telah mempersiapkan FREL provinsi, dan pertemuan tahunan Gugus Tugas Gubernur untuk Kehutanan dan Iklim pada tahun ini akan diselenggarakan di Balikpapan, Indonesia. Dengan demikian, ada kemajuan REDD+ sub-nasional di tingkat provinsi, dan Proyek IJ-REDD+ akan terus mendukung proses pengembangan REDD+ sub-nasional di Kalimantan Barat.

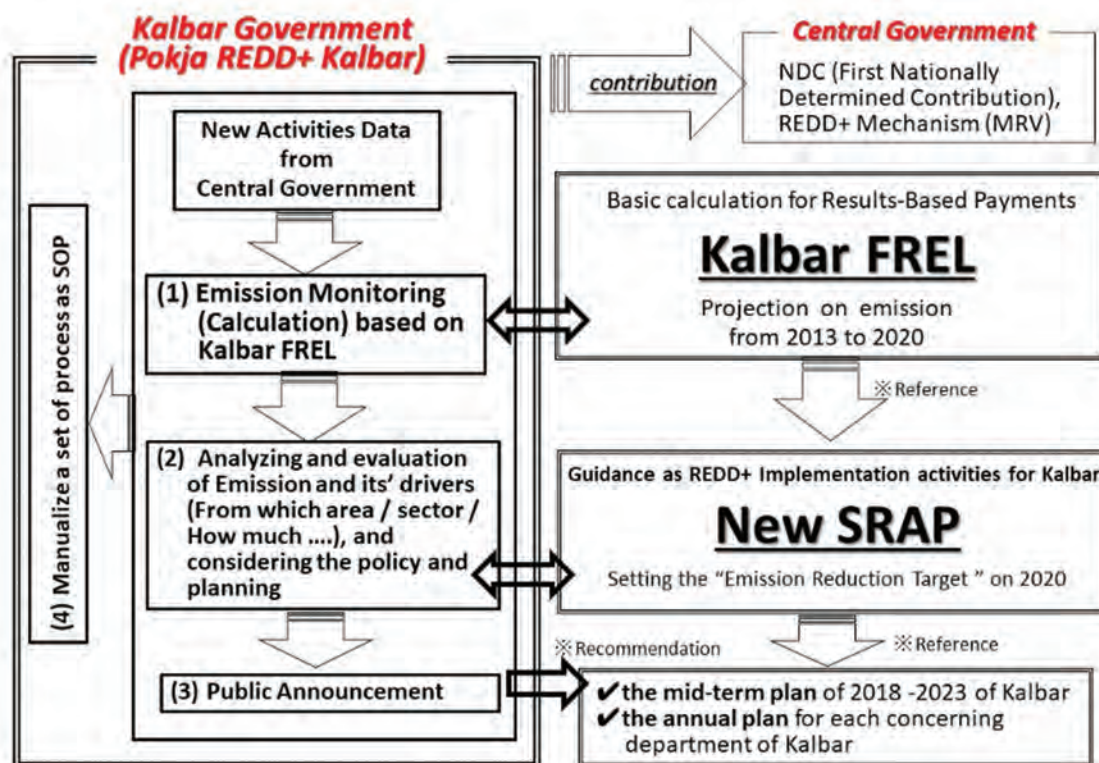
The concerned agencies responsible for preparing a provincial mid-term development plan and annual work plans are expected to reflect the abovementioned work related to CO₂ emissions. In addition, it is suggested that the following perspectives should be incorporated:

1. *Conducting an analysis of the causes of deforestation and forest degradation at the district, sub-district, and village levels*
2. *Referring to valid and accurate data from the respective sectors, including forestry, agriculture, mining, and others*
3. *Conducting ground truthing to enhance data accuracy*
4. *Clarifying the roles of the concerned stakeholders and their institutional arrangements*

Monitoring work related to deforestation and forest degradation in 2012–15 included a district-level analysis, and its findings suggest the following: (i) the development of fast-wood plantations in the Ketapang and Kayong Utara districts is one of main factors that contribute to deforestation and (ii) deforestation is more prominent in the Non-Forest Zone than it is in the Forest Zone.

Conclusion

In Indonesia, the provinces of West Kalimantan and East Kalimantan have already prepared a provincial FREL, and this year's annual meeting of the Governors' Climate and Forest Task Force was held in Balikpapan, Indonesia. The advancement of a sub-national REDD+ at the provincial level is progressing, and the IJ-REDD+ Project will continuously support the process of sub-national REDD+ development in West Kalimantan.



Gambar: Sekilas pengembangan REDD+ di Kalimantan Barat
Figure: Overview of REDD+ development in West Kalimantan